

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Septian Hario Seto  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,            September 2020

PIHAK KEDUA,  
  
Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,  
  
Septian Hario Seto 

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI**  
**INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

**TARGET KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
<b>Stakeholder Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	60
SS.2	Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%
SS.3	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%
<b>Customer Perspective</b>				
SS.4	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	8 Hari
SS.5	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%
SS.6	Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional	6	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%
SS.7	Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional	7	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan Terhadap PDB	0,8%
<b>Internal Business Perspective</b>				
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri	100%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	80%

SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Investasi dan Pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputy	60
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	65
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputy	70

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Rp 1.500.000.000,-
2	Koordinasi Investasi Bidang Jasa	Rp 1.500.000.000,-
3	Koordinasi Investasi Strategis	Rp 1.500.000.000,-
4	Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Rp 1.500.000.000,-
5	Koordinasi Pertambangan	Rp 1.500.000.000,-
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp 2.500.000.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp 10.000.000.000,-</b>

Jakarta, September 2020

Menteri Koordinator  
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI,

  
Luhut B. Pandjaitan

Deputy Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan,

  
Septian Hario Seto

**LAMPIRAN II**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI**  
**INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

**RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	1. Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )				✓
2.	Persentase Investasi di Luar Jawa	2. Investasi di Luar Jawa				✓
3.	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	3. PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan				✓
4.	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	4. Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )				✓
5.	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	5. Investasi Bidang Jasa				✓
6.	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	6. Investasi Strategis				✓
7.	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	7. Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha				✓
8.	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	8. Hilirisasi Pertambangan				✓
9.	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Dijadikan sebagai Kebijakan Menteri	9. Rancangan Koordinasi Kebijakan Integrasi Sistem Perizinan				✓
		10. Rancangan Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi				✓
		11. Rancangan Koordinasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa				✓
		12. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Bidang Jasa				✓
		13. Rancangan Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa				✓
		14. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Bidang Jasa				✓
		15. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis				✓



NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
		16. Rancangan Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Fasilitasi Investasi Strategis				✓
		17. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Strategis				✓
		18. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		19. Rancangan Koordinasi Kebijakan Implementasi Penjajakan Minat Pasar Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		20. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		21. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral				✓
		22. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara				✓
		23. Rancangan Koordinasi Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara				✓
10.	Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	24. SDM yang sesuai Kompetensinya				✓
11.	Nilai PMPRB Deputy	25. Nilai PMPRB Deputy				✓
12.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	26. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy				✓
13.	Nilai IKPA Deputy	27. Nilai IKPA Deputy				✓

Jakarta, September 2020

Deputi Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan



Septian Hario Seto 